

REVITALISASI SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN BERBASIS PERADABAN BANGSA

Suwito Eko Pramono
Jurusan Sejarah, FIS-Unnes
suwitoekop@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Fungsi utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban nasional. Penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selama ini, pendidikan hanya diarahkan pada perkembangan intelektualitas peserta didik dan cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya sebagai landasan pembangunan peradaban bangsa. Berbagai perilaku anti-sosial, psikopat, dan anomali merupakan bukti rendahnya kesadaran anak bangsa terhadap nilai-nilai sosial, budaya, etika, dan estetika. Indonesia pun tergolong sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan belum mampu mewujudkan peranan yang strategis, yaitu membangun peradaban bangsa.

Evaluasi pendidikan sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan harus mampu memberikan arah bagi terselenggaranya hakikat pendidikan. Namun dalam praktiknya, evaluasi pendidikan hanya menyentuh aspek-aspek yang bersifat kuantitas. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan agar peranan pendidikan dalam pembangunan peradaban bangsa dapat diaktualisasikan secara nyata, yaitu melalui transfer of values sebagai dasar pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Kata kunci: pendidikan, peradaban, sikap, kepribadian, perilaku.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beradab karena memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, seperti gotong royong, kerja sama, tolong menolong, hormat menghormati, toleran, religius, dan sebagainya. Namun, sebutan itu layak dicermati karena berbagai perilaku manusia Indonesia cenderung semakin jauh dari nilai-nilai peradaban. Berbagai perilaku antisosial yang diwarnai berbagai bentuk kekerasan dan penyimpangan telah menjadi perilaku ‘**psikopat**’ yang memprihatinkan. Itu semua merupakan indikator kegagalan pembangunan manusia dan masyarakat yang berperadaban dan berkepribadian Indonesia.

Terlepas dari penyebab yang melatari, perilaku ‘psikopat’ yang makin marak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dicermati dan diantisipasi dengan solusi yang tepat. Salah satu solusi yang dipandang cukup strategis adalah membangun kembali peradaban bangsa sebagai pedoman bagi setiap perilaku manusia Indonesia. Pada waktu peringatan 1 Muharam 1427 H, Presiden SBY pernah mengajak semua komponen bangsa untuk membangun peradaban bangsa dengan sungguh-sungguh (Kompas, 2-2-2006). Di samping itu, kehadiran para tokoh nasional seperti Gus Dur, Megawati, Try Sutrisno, Wiranto, Jenderal Ryamizard Ryacudu, Prof. Dr. Sri Sumantri, SH, dan Marwah Daud Ibrahim dalam seminar yang bertajuk “**Membangun Peradaban Indonesia**” yang diselenggarakan Nusantara Bangkit Bersatu pada tanggal 5 Pebruari 2006 merupakan bukti pentingnya pembangunan peradaban bangsa.

Pembangunan peradaban bangsa sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah digagas para *founding father* dan hasilnya tertuang dalam rumusan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai *value system* dan pandangan hidup harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tertib, damai, adil, dan makmur. Orde Baru sebagai tatanan pemerintahan

yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada setiap insan Indonesia melalui ‘pendidikan P4’. Sayangnya, pelaksanaan pendidikan P4 diwarnai dengan indoktrinasi sehingga mematikan kreativitas masyarakat Indonesia dalam memahami nilai-nilai Pancasila secara konstruktif. Bahkan, Pancasila telah dijadikan payung pembenar terhadap politik ‘salah tingkah’ bersamaan dengan pelaksanaan sistem otoritarian di Indonesia. Oleh karena itu, cara-cara yang ditempuh pemerintah Orde Baru sulit melahirkan ‘budaya partisipatif’ (Gafar, ed., 1983) atau menurut istilah Almond dan Verba (1965) hanya akan melahirkan budaya politik ‘parokial’. Sementara, keteladanan para pemimpin yang sangat diperlukan dalam membangun peradaban bangsa (*value system*) hampir sulit ditemukan dalam kehidupan nyata (Ma’arif, 2005).

Berdasarkan kenyataan di atas, maka tidak berlebihan apabila berbagai perilaku antisosial dan psikopat seperti korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, perampokkan, penyalahgunaan wewenang, vandalisme, brutalisme, anarkis terjadi di mana-mana tanpa mengenal waktu dan tempat. Apakah fenomena itu merupakan bukti kegagalan pembangunan peradaban bangsa? Di manakah letak kesalahannya? Bagaimanakah peranan pendidikan dalam pembangunan peradaban bangsa?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat menarik untuk dikaji secara kritis sekaligus sebagai upaya untuk menemukan solusinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan bahan diskusi bagi seluruh warga masyarakat, terutama para pendidik dan para pemerhati pendidikan sehingga dapat mengaktualisasikan peranan dan fungsi lembaga pendidikan dalam pembangunan peradaban bangsa.

Pembangunan Peradaban Bangsa

Peradaban merupakan salah satu parameter yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi sering disebut sebagai bangsa yang telah maju. Sebelum tarikh masehi, bangsa Mesir, Babylonia, India, Cina, dan Yunani sering dikatakan sebagai bangsa yang maju karena memiliki peradaban yang tinggi. Sementara, sebagian besar bangsa Eropa (termasuk Amerika Serikat) masih disebut sebagai bangsa bar-bar. Pada zaman modern, pengukuran peradaban bangsa terkesan telah mengalami pergeseran dari nilai-nilai kehidupan ke arah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informatika. Namun, kenyataan yang terjadi tidak demikian seperti dapat dilihat dari rumusan-rumusan yang dihasilkan setelah Revolusi Perancis (*liberty, equality, dan fraternity*), Revolusi Amerika (kebebasan individu dan pengakuan hak asasi manusia), maupun pasca Perang Dunia (persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan keadilan).

1. Pengertian Peradaban

Terminologi peradaban berasal dari kata *civilization* dan sering digunakan secara bergantian dengan istilah kebudayaan (*culture*). Kedua istilah itu memiliki pengertian yang hampir sama, meskipun cakupannya berbeda. Kebudayaan atau *culture is the pattern of taken-for-granted assumptions about how a given collection of people should think, act, and feel as they go about their daily affairs* (Kreitner, 1999: 110). Secara sadar atau tidak, perilaku seseorang hampir selalu didasarkan pada norma, nilai, dan etika yang diyakini dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, Bounds (1994: 101) mengatakan bahwa *culture as a pattern of artifacts, behavior, values, belief, and assumptions that a group develops as it learns to cope with internal and external problems of survival and prosperity*.

Budaya dapat diartikan sebagai suatu falsafah yang didasarkan pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, serta tercermin dalam sikap, kepercayaan dan cita-cita, pendapat, persepsi, dan perilaku para anggotanya. Meskipun demikian, budaya lebih sering dilihat dari bentuk fisiknya dan dikaitkan dengan karya seni. Sedangkan peradaban memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak terbatas pada ‘seni’, tetapi lebih berkaitan dengan ‘*value system*’ sebagaimana pernyataan di bawah ini.

The culture tradition as an object of orientation as well as culture patterns as internalized patterns of cognitive expectations and of cathectic evaluative selection among possible orientations that are of crucial significance in the personality systems and in the social systems (Parsons, 1951: 7).

Pendek kata, peradaban bangsa merupakan konstelasi *mindset* nilai-nilai budaya yang melampaui batas-batas wilayah, suku, agama, ras, dan unsur-unsur khas yang lain. Sementara itu, nilai-nilai budaya berkaitan dengan cara seseorang dan/atau sekelompok orang bertindak atau memandang sesuatu (*total ways of life of certain societies*).

Secara konseptual, peradaban memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan, meskipun istilah kebudayaan lebih familiar karena lebih kongkrit daripada istilah peradaban. Kiranya tidak terlalu asing dengan istilah ‘kehidupan budaya’ atau diskusi tentang ‘kebudayaan’ daripada diskusi tentang ‘peradaban’. Meskipun demikian, hampir semua orang akan merasakan bahwa kebudayaan atau peradaban tidak selalu dihayati dalam citarasa yang sama, dipahami dalam pengertian yang sama, dibicarakan dengan idiom-idiom yang sama. Perbedaan-perbedaan ini, selain menyangkut variasi dalam aksentuasi, juga menyangkut perbedaan logika, baik yang berkaitan dengan kerangka konseptual maupun minat dan kepentingannya. Sekurangnya, ada tiga kelompok yang mewakili pengertian khas peradaban dan memberikan penekanan yang spesifik terhadapnya. Ketiganya adalah para eksekutif pemerintahan dan politik, para ilmuwan sosial, serta para budayawan dan seniman (Kleden, 1987).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditangkap adanya kesamaan bahwa peradaban selalu dipandang sebagai sesuatu yang khas dari manusia karena manusiawi atau dapat memanusiaikan manusia. Oleh karena itu, peradaban selalu dihubungkan dengan kebaikan, kebenaran, keluhuran budi, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam segala aspek kehidupannya karena memiliki nilai yang universal. Hampir tidak ada selisih pendapat mengenai *value judgement* tentang peradaban. Dalam pengertian nilai, peradaban atau kebudayaan adalah *a pursuit a total perfection* (Koreber dan Kluchohn, 1963).

Diskusi tentang peradaban atau kebudayaan semakin penting artinya karena setiap perilaku seseorang, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat memerlukan *value judgement*. Demikian juga perilaku para eksekutif memerlukan legitimasi politik dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dengan cara yang sama, suatu tujuan politik perlu dilandasi legitimasi peradaban. Hal ini dapat dilihat dari cita-cita kolektif dan ide-ide suatu komunitas yang menjadi elemen psikologis dan spiritual yang biasa dirumuskan dalam mitos atau ideologi (Deverger, 1981). Artinya, dalam rangka suatu kebudayaan atau pembangunan peradaban bangsa, tujuan atau program politik adalah *reasonable* karena tidak menimbulkan kontradiksi dan *acceptable* karena tidak perlu menimbulkan resistensi, apalagi oposisi.

Pemikiran-pemikiran di atas sejalan dengan beberapa pernyataan Fischer (1970), bahwa:

- (1) Peradaban mempresentasikan integrasi sosio-kultural yang berbeda satu sama lainnya, tetapi merupakan unit kultural historikal yang unik karena memiliki nilai yang universal.
- (2) Walaupun bentuk formal peradaban memiliki kecenderungan yang sama, namun mereka berbeda dari segi *value*, konfigurasi institusional, tingkat perubahan, persepsi, serta kebijakan politik, ekonomi, militer, maupun agama.
- (3) Sebagai suatu unit, peradaban memberikan konfigurasi pada institusinya dan kerumitan institusi merupakan mekanisme adaptif yang didisain untuk menjawab tantangan lingkungan sosio-kulturalnya.
- (4) Peradaban merupakan jaringan budaya yang dicirikan oleh saling ketergantungan yang menguntungkan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka pembangunan peradaban bangsa dapat dikatakan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu ‘*value systems*’ atau ‘*value judgement*’ yang dapat diterima semua komponen bangsa karena mampu melampaui batas-batas wilayah dan mengatasi kepentingan daerah, etnis, suku, ras, agama, dan ciri khas lainnya. Dalam konteks seperti itu, pembangunan peradaban bangsa dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai

budaya masyarakatnya maupun nilai-nilai budaya yang berasal dari luar, terutama yang dapat diterima secara luas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan peradaban tidak harus selalu diartikan sebagai usaha menciptakan sistem nilai yang baru karena melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat merupakan bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

2. Indikator Peradaban Bangsa

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan peradaban bangsa diperlukan adanya parameter sebagai kriteria. Perumusan parameter atau indikator-indikator peradaban bangsa dapat dilakukan oleh setiap orang karena tidak membutuhkan persyaratan yang rumit. Hampir setiap orang dapat membedakan antara nilai-nilai yang benar dan salah, baik dan buruk, bermoral dan amoral, beradab dan biadab, indah dan tak indah, etis dan tak etis. Kemampuan itu merupakan bekal bagi usaha merumuskan indikator-indikator peradaban bangsa. Namun, tidak ada jaminan bahwa indikator-indikator peradaban bangsa yang dirumuskan dapat diterima oleh orang lain.

Mengingat peradaban bangsa merupakan *value system* yang berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; maka indikator keberhasilan pembangunan peradaban bangsa dapat dilihat dari konsep atau sistem nilai yang kongkrit dan dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- (1) Terciptanya kehidupan yang mengutamakan akhlak mulia dan budi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai agama, hukum, sosial, kultural, etika, dan estetika yang diakui dan dijunjung tinggi secara universal.
- (2) Terciptanya kehidupan yang demokratis, yaitu kehidupan yang bebas untuk menentukan pilihan tanpa ada tekanan dari bangsa, kelompok, atau orang lain.
- (3) Terciptanya kehidupan yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai modal pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif dalam persaingan global (*nation's competitiveness*).
- (4) Terciptanya kehidupan yang berdasarkan keahlian dan profesionalisme, serta kemandirian dan etos kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang didukung dengan kecakapan personal, intelektual, sosial, vokasional, dan emosional spiritual.
- (5) Terciptanya kehidupan yang mengutamakan integritas, kedisiplinan, tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing individu menurut norma-norma kehidupan yang berlaku.
- (6) Terciptanya kehidupan yang mengutamakan sikap toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai dan menghormati, saling membantu dan menolong sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera.
- (7) Berkembangnya perilaku untuk mendahulukan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (8) Berfungsinya lembaga kenegaraan secara konstitusional, baik di pusat maupun daerah sebagai awal terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan berwibawa berdasarkan Pancasila.
- (9) Terwujudnya kepemimpinan nasional, daerah, maupun nonformal yang bersih, jujur, bertanggung jawab, disiplin, berwibawa, dan memiliki integritas terhadap kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat.

Sebenarnya, indikator-indikator peradaban bangsa sebagai *value system* telah dipikirkan dan dirumuskan oleh para *founding father*, jauh sebelum Indonesia merdeka. **Muh. Yamin** mengatakan bahwa untuk mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan *value system* atau pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem nilai itu harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan masyarakat bangsanya. Artinya, kita tidak boleh sekedar meniru peradaban bangsa lain atau sekedar melestarikan nilai-nilai masa lampau yang berasal dari zaman kerajaan (Bahar, 1995).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka *value system* sebagai kristalisasi peradaban bangsa harus dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa karena mampu melampaui batas-batas wilayah dan mengatasi kepentingan daerah, etnis, suku, ras, agama, dan ciri khas lainnya. Di samping itu, setiap *value system* harus dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Peranan Pendidikan

Sebenarnya, peranan lembaga pendidikan dalam pembangunan peradaban bangsa tidak perlu diperdebatkan. Argumen itu didasarkan pada beberapa kenyataan, seperti: **Pertama**, secara historis sistem sekolah lahir dan berkembang dari suasana yang di-ciptakan oleh negara-negara berperadaban (Fischer,1970). Lebih lanjut, Fischer menjelaskan hubungan antara negara, sistem sosio-politik, dan sekolah dalam pembangunan peradaban seperti berikut:

“Not only does each socio-political system create its own value and ethics in addition its institutional configurations, but each has its own patterns for the transmission and perpetuation of the culture. Like the sphere of religion, law, stratification, and economic relationships, the educational sphere of a society must be congruent with the total way of life of the group and must be attended to its socio-political organization” (1970: 72).

Ketika negara berada dalam jaringan peradaban, ia membutuhkan sekelompok orang yang mampu memberikan keuntungan bagi negara dalam hubungannya dengan negara lain. Untuk itu, cara yang penting adalah mengadopsi nilai, kriteria, dan standar perilaku yang dijadikan pedoman dan dapat diterima secara universal melalui proses pendidikan di sekolah. *‘The essence of schooling is that serves the adoption of universalistic values, criteria, and standards of performance’* (Fischer, 1970: 84). Dengan demikian, fungsi sekolah adalah menanamkan, melestarikan, dan mengembangkan peradaban bangsa sesuai dengan perkembangan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, Presiden Soekarno pernah menegaskan arti pentingnya pendidikan dalam ‘revolusi’. Presiden Soekarno menyatakan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai revolusi dalam satu generasi, (*‘a summing up of many revolution in one generation’*), termasuk perubahan radikal dari feodal ke demokrasi dan dari tradisional ke modern yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sudijarto, 2005). Revolusi atau perubahan itu harus dimaknai sebagai bagian dari pembangunan peradaban bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan modern yang disebut sekolah, terutama dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, *United Nations Development Program* (UNDP), salah satu organisasi PBB, menggunakan tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur **Human Development Index** (HDI), di samping tingkat kesehatan dan rata-rata pendapatan penduduk. Sementara, Direktur Jenderal UNESCO menegaskan agar setiap bangsa memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama intelektual guna mengembangkan konsep-konsep dan praktik-praktik pendidikan yang bermutu, adil, dan merata (Delors, 2002).

Keempat, pemerintah Indonesia pun mengakui peranan lembaga pendidikan dalam pembangunan peradaban bangsa sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka fungsi utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan berdasarkan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, kecerdasan sebagai modal untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik tidak akan berarti apabila

tidak didasarkan pada watak dan peradaban bangsa yang secara universal dapat diterima dan dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab.

Kelima, visi pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Di samping itu, misi pendidikan nasional yang keempat menyebutkan bahwa misi pendidikan nasional adalah meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas, kiranya cukup jelas bahwa pendidikan memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam pembangunan peradaban bangsa. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan pendidikan terkesan belum mampu menyentuh aspek-aspek yang berkaitan atau menunjang pembangunan peradaban bangsa. Pendidikan karakter, pendidikan berbasis lingkungan (fisik maupun sosial), pendidikan kebencanaan, dan berbagai jenis pendidikan ekstra-kurikuler merupakan bukti pentingnya pendidikan nilai sebagai landasan pembangunan peradaban bangsa. Bahkan, pemerintah telah menetapkan pendidikan kepramukaan sebagai mata pelajaran ekstra-kurikuler wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 63 Tahun 2014. Untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan revitalisasi sistem evaluasi pendidikan, yaitu dengan menekankan pada pendidikan nilai.

Revitalisasi Sistem Evaluasi Pendidikan

Semakin maraknya perilaku ‘antisosial’ dan ‘psikopat’ merupakan bukti bahwa peranan pendidikan dalam pembangunan peradaban bangsa belum dapat direalisasikan. Kenyataan itu tidak dapat dipisahkan dengan kondisi pendidikan nasional yang belum berfungsi secara maksimal. Berkaitan dengan itu, berbagai analisis pun dilakukan guna mengetahui akar permasalahannya, baik melalui kajian teoritis maupun empirik. Namun, perlu diingat bahwa untuk memperoleh hasil kajian yang ampuh dan ‘mujarab’ bukan pekerjaan yang mudah. Husen dan Kogan (1984) mengatakan bahwa sulit menemukan hasil penelitian di sektor pendidikan yang *instant*. Artinya, hasil-hasil temuan dalam penelitian di sektor pendidikan hampir selalu membutuhkan kajian ulang sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, seperti: (1) penerapan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak konsekuen; (2) penerapan pendekatan sentralistik-birokratik; dan (3) rendahnya partisipasi warga sekolah dan masyarakat, khususnya guru dan orangtua peserta didik (Umaedi, 2002: 1-2). Persoalan pendidikan di Indonesia diperburuk oleh pengelolaan pendidikan yang kurang efektif dan efisien sebagai akibat rendahnya mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan (Suryadi dan Dasim Budimansyah, 2004).

Terlepas dari akar permasalahannya, ada kesan bahwa pendidikan sebagai proses olah pikir, olah karsa, olah rasa, dan olah raga belum dapat diaktualisasikan secara nyata sehingga menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Para siswa pun cenderung kurang mampu menguasai berbagai kompetensi (personal, intelektual, sosial, dan emosional spiritual) yang seharusnya, setelah mereka menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penyelenggaraan pendidikan pun masih menyisakan berbagai persoalan seperti yang terakumulasi dalam arah kebijakan pembangunan sektor pendidikan atau yang lebih dikenal sebagai **tiga pilar pendidikan nasional**, yaitu: (1) peningkatan pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan; serta (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Apabila dianalisis, persoalan pendidikan di atas tidak dapat dipisahkan dari sistem evaluasi di bidang pendidikan. Evaluasi sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sungguh-sungguh, dan transparan. Misalnya, akreditasi lembaga dan program studi cenderung kurang objektif karena hanya didasarkan pada pengisian borang akreditasi dan kurang memperhatikan kondisi aktual lembaga atau program studi yang bersangkutan. Artinya, pengisian borang akreditasi yang lengkap dan teratur cenderung akan menghasilkan nilai akreditasi A. Masih banyak program studi di ITB yang mendapatkan nilai akreditasi C karena di ITB tidak ada ‘tukang’ penyusun borang akreditasi. Sebaliknya, sebagian besar program studi di PTS mendapat nilai akreditasi A, pada hal sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki hanya pas-pasan, tenaga dosen yang berpendidikan magister dan doktor masih terbatas, serta perkuliahan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Dengan demikian, akreditasi sebagai salah satu bentuk evaluasi tidak dapat dijadikan dasar penjaminan dan penetapan mutu pendidikan.

Sistem evaluasi semacam itu tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tetapi juga terjadi dalam evaluasi sekolah. Beberapa waktu yang lalu kita mengenal sebutan sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rencana sekolah bertaraf internasional (RSBI). Benarkah ada SBI atau RSBI? Rasanya sulit dipercaya bahwa ada sekolah yang disebut SBI, tetapi sekolah yang disebut RSBI sangat mungkin. Suatu sekolah disebut SBI apabila sekolah tersebut telah memenuhi berbagai indikator. Namun, indikator itu sangat sulit untuk dipenuhi. Apabila ada peserta didik yang berhasil merebut medali dalam olimpiade, maka keberhasilan itu tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa peserta didik yang bersangkutan berasal dari SBI. Pada umumnya mereka yang berhasil merebut medali dalam olimpiade telah dikarantina beberapa bulan dengan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan istilah RSBI sangat mungkin karena hanya menggambarkan keadaan sekolah yang sedang menuju ke bertaraf internasional, meskipun status itu tidak pernah akan tercapai.

Sementara, evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik sebagaimana diatur pada Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003. Namun, dalam kenyataannya setiap peserta didik harus mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Celakanya, hasil UN tersebut menjadi penentu kelulusan peserta didik, meski akan disandingkan nilai yang disiapkan sekolah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pelaksanaan UN membawa dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Proses pendidikan (pembelajaran) akan berubah menjadi proses latihan menyelesaikan soal dan sekolah cenderung melakukan manipulasi nilai untuk membantu kelulusan peserta didiknya. Di samping itu, sebagian besar soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif dan sebagian kecil yang mengukur keterampilan. Sedangkan soal UN yang mengukur sikap dapat dipastikan sangat minim, apabila tidak dapat dikatakan tidak ada.

Tingkat kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan yang membanggakan karena mencapai angka di atas 90%, namun tidak menggambarkan mutu pendidikan yang sesungguhnya. Tingginya tingkat kelulusan lebih disebabkan oleh rendahnya nilai batas kelulusan. Artinya, tingginya tingkat kelulusan belum memberikan sumbangan yang berarti dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. Kenyataan itu merupakan tantangan yang harus diperhatikan, sekaligus adanya keberanian untuk melakukan perubahan terhadap sistem evaluasi pendidikan yang selama ini dilaksanakan.

Pada dasarnya, pemerintah telah berusaha untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti:

- (1) Pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai jawaban atas pendekatan sentralistik-birokratis yang dipandang kurang berhasil dan berdaya guna.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai jawaban atas pengelolaan pendidikan yang kurang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada proses sebagai jawaban atas pendekatan *input-output analysis*.

- (4) Pelaksanaan **empat pilar pendidikan kesejagatan** yang dikembangkan UNESCO, yaitu: (1) *learning to know*, (2) *learning to be*, (3) *learning to do*, dan (4) *learning to live together*.
- (5) Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan sistem penilaian hasil belajar, pelaksanaan Ujian Nasional, dan sebagainya.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan mutu pendidikan. Ada beberapa persoalan yang selama ini dilupakan, di antara-nya revitalisasi pendidikan yang dapat dilakukan melalui beberapa aspek. **Pertama**, revitalisasi sistem evaluasi pendidikan, di mana pemerintah harus berani menggunakan konsep *market drive corporate* (MDC). Artinya, pemerintah harus berani menyerahkan persoalan evaluasi pendidikan kepada pasar, masyarakat pengguna, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah. Mutu pendidikan tidak semata-mata diukur dari peningkatan penguasaan, tetapi harus diukur dari aspek relevansinya dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, evaluasi pendidikan sebaiknya diserahkan kepada institusi pendidikan dan pemerintah daerah. Sedangkan evaluasi hasil belajar diserahkan kepada guru, baik yang menyangkut proses, kemajuan, maupun perbaikan hasil belajar peserta didik.

Mutu institusi pendidikan dan program studi tidak semata-mata diukur dari hasil akreditasi, tetapi harus diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat penggunanya. Indeks prestasi mahasiswa yang tinggi kadang-kadang tidak menggambarkan kompetensi maupun daya saing mahasiswa yang bersangkutan. Biarlah pasar yang menilai dan lembaga pendidikan yang berusaha untuk memperbaiki mutunya. Hal ini sangat penting karena indeks prestasi mahasiswa yang sama dan dari program studi yang sama, tetapi dari perguruan tinggi yang berbeda belum tentu memiliki kompetensi dan daya saing yang sama. Persoalan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan sebaiknya diserahkan kepada pasar dan masyarakat pengguna. Sekarang masyarakat makin cerdas untuk memiliki lembaga pendidikan yang baik dan bermutu.

Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sebaiknya kelulusan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang dalam menuntut pendidikan. Kita harus berani menentukan STTB sebagai ukuran keberhasilan seseorang dalam menuntut pendidikan, di samping tanda kelulusan. Kadang-kadang kelulusan yang ditentukan berdasarkan nilai minimal dari beberapa mata pelajaran kurang realistis apabila dikaitkan dengan kebutuhan pasar kerja maupun kemampuan peserta didik. Sebagian besar peserta didik yang gagal mencapai kelulusan disebabkan oleh rendahnya kemampuan mereka pada mata pelajaran Bahasa Inggris atau Matematika. Pada hal setelah mereka bekerja tidak membutuhkan kemampuan Bahasa Inggris atau Matematika. Oleh karena itu, penggunaan STTB tanpa tanda lulus sebagai dasar untuk melamar pekerjaan tetap realistis dan tidak selalu menjadi indikator kegagalan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik tidak akan menurunkan mutu pendidikan.

Selain itu, tanpa campur tangan pemerintah dalam menentukan kelulusan akan memungkinkan beban kerja para pendidik terasa lebih ringan. Sebaiknya, pendidik tidak dibebani dengan target-target jumlah kelulusan yang tinggi. Peserta didik yang tidak lulus UN belum tentu lebih rendah kompetensinya dibandingkan dengan peserta didik yang lulus UN. Untuk itu, pemerintah harus berani memberikan STTB kepada peserta didik, meski mengalami kegagalan dalam UN dan mengambil kebijakan bahwa STTB dapat digunakan sebagai modal untuk mencari atau melamar pekerjaan.

Kedua, berorientasi *outward looking* dan bukan sekedar *inward looking*. Selama ini pendidikan dipandang sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat tanpa dikaitkan dengan pembangunan sektor yang lain. Konsep pendidikan lebih menonjolkan tujuan pendidikan yang bersifat ke dalam (*inward looking*), yaitu mendidik manusia agar cerdas, berkepribadian, dan berpengetahuan luas. Bermanfaat tidaknya kecerdasan, kepribadian, dan pengetahuan dalam pembangunan di berbagai sektor kehidupan, dianggap sebagai isu yang tidak penting.

Namun, zaman terus berubah dan setiap bidang kehidupan memiliki saling ketergantungan satu sama lainnya dalam suatu sistem yang integral. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan harus semakin berorientasi keluar (*outward looking*) karena pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang lebih luas. Inilah tantangan yang harus dipikirkan agar pelaksanaan pendidikan lebih berhasil dan berdaya guna.

Berkaitan dengan persoalan dan pemikiran di atas, maka pendidikan nasional akan dinilai bermutu dan efisien apabila benar-benar bermanfaat bagi percepatan kemajuan kehidupan masyarakat. Titik singgung antara pendidikan dan kemajuan kehidupan masyarakat adalah SDM yang bermutu karena manusia itulah yang akan menjadi pelaku utama pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang mampu menjadi kekuatan atau sumber penggerak (*driving force*) bagi seluruh proses pembangunan. Atas dasar pemikiran itulah, muncul konsep pendidikan yang dikenal dengan efisiensi eksternal (*external efficiency*), yaitu konsep yang menekankan hubungan timbal balik antara pendidikan dan bidang-bidang pembangunan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mewujudkan pemikiran di atas, maka **revitalisasi** pendidikan merupakan jawabannya dan bukan **reformasi** pendidikan karena konsep-konsep yang ditawarkan merupakan konsep lama yang belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam kerangka revitalisasi, **human capital investment** harus diaktualisasikan karena pendidikan mempunyai makna multi-dimensional, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik (Suryadi dan Dasim Budimansyah, 2004). Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan berbagai perspektif. Dalam **perspektif sosial**, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial. Pendidikan menjadi determinan percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah pada konstruksi sosial baru, yaitu masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*). Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting dalam memantapkan integrasi sosial sebagai modal pembentuk **integrasi nasional** yang mantap.

Dalam **perspektif budaya**, pendidikan merupakan wahana yang efektif bagi proses transformasi budaya (norma, nilai, dan etos kerja) di kalangan warga masyarakat. Pendidikan dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan, peranan pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasi semakin kuat. Untuk itu, diperlukan nilai-nilai peradaban bangsa sebagai filter untuk menyaring pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif warga bangsa untuk menghargai keragaman budaya, ras, suku, dan agama sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

Dalam **perspektif ekonomi**, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia (*human investment*) yang andal untuk menjadi subjek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan yang bermutu, memiliki pengetahuan, menguasai teknologi dan keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki jiwa kewirausahaan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Bahkan, peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa sebagai prasyarat mutlak dalam kehidupan global yang semakin kompetitif.

Pada era global, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan **knowledge-based economy (KBE)**, yang mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, **education for the knowledge economy (EKE)**. Dalam konteks ini, satuan pendidikan harus berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (**research and development**) yang mampu menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Keberhasilan pengembangan ekonomi nasional sangat bergantung pada keunggulan sumber

daya alam dan SDM yang bermutu (cerdas, berkepribadian, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi). Oleh karena itu, titik temu antara pendidikan dan pembangunan ekonomi harus menjadi orientasi pelaksanaan pendidikan.

Dalam **perspektif politik**, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan harus mampu melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk *critical mass*, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan landasan menuju terwujudnya masyarakat demokratis sebagai pilar utama bagi *civil society*.

Dengan demikian, SDM yang bermutu sebagai titik temu antara pendidikan dan percepatan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan dapat terwujud, manakala pendidikan dilaksanakan berdasarkan keempat perspektif pendidikan di atas. SDM yang bermutu dapat diukur dari beberapa indikator, seperti: (1) bertambahnya tenaga ahli dan profesional, (2) berkurangnya ketergantungan pada dana dan investasi dari luar negeri, (3) meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan (4) meningkatnya daya tahan masyarakat dalam menjaga eksistensinya.

Ketiga, pelaksanaan pendidikan secara utuh. Pada hakikatnya, pendidikan harus dilaksanakan secara utuh, yaitu mencakup seluruh aspek dimensi manusia. Perkembangan intelektual peserta didik terasa kurang sempurna manakala tidak disertai dengan sikap dan kepribadian profesional dan keterampilan fungsional. Dengan demikian, berkembangnya sistem nilai sebagai bagian peradaban bangsa merupakan salah satu tujuan pendidikan yang mendasar. Oleh karena itu, pendidikan bukan semata-mata bertujuan untuk mengembangkan SDM yang bermutu. Ada 4 (empat) indikator SDM bermutu sebagai landasan penting menuju terwujudnya: (1) *civilsociety* Indonesia, (2) modernisasi ekonomi dan ketenagakerjaan, (3) berkembangnya nilai dan sistem budaya modern, dan (4) terwujudnya manajemen publik yang demokratis. Dengan demikian, harapan terwujudnya peranan pendidikan dalam proses pembangunan peradaban bangsa bukanlah sebuah keniscayaan.

Apabila dikaitkan dengan fungsi pendidikan, maka pembangunan peradaban bangsa harus menjadi orientasi pelaksanaan pendidikan seutuhnya. Keberhasilan pembangunan peradaban bukan hanya sebagai modal dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan, melainkan sebagai bekal dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, damai, dan beradil.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. **Pertama**, perilaku antisosial sebagai fenomena kehidupan masyarakat Indonesia sudah sampai pada titik kritis dan perlu dicarikan obat untuk menyembuhkannya. Hampir setiap hari kita dapat menyaksikan berbagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penodongan, perampokan, kerusuhan, penyalahgunaan wewenang, KKN, dan berbagai perilaku psikopat yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Kedua, pembangunan peradaban bangsa sebagai upaya pengembangan *values system* yang mampu melampaui batas-batas wilayah, kepentingan daerah, etnis, suku, agama, ras, dan unsur khas lainnya dipandang sebagai langkah yang strategis dalam rangka menyembuhkan penyakit sosial yang sangat memprihatinkan. Peradaban bangsa dapat berfungsi sebagai *frame work* dan tolok ukur penataan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang modern dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, pembangunan peradaban bangsa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena memungkinkan terwujudnya kehidupan yang aman, tertib, dan damai karena dilandasi prinsip-prinsip kejujuran, ketulusan, keikhlasan, keadilan, kedisiplinan, kemandirian, bertanggung jawab, toleran, suka menolong, saling menghargai dan menghormati, demokratis, bersemangat (etos kerja), gigih, tidak mudah putus asa, serta mendahulukan kepentingan agama, negara bangsa, dan orang lain.

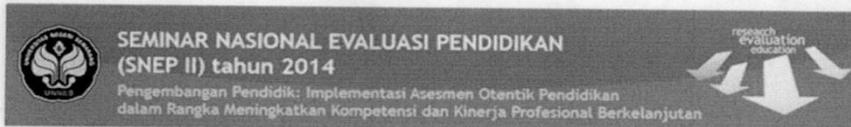
Keempat, pendidikan (terutama formal) memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan peradaban bangsa karena: (1) sekolah lahir dari suasana yang diciptakan oleh negara-negara berperadaban; (2) sekolah merupakan tempat untuk mengkaji berbagai persoalan (termasuk sistem nilai) secara rasional, kritis, realistik, sistemik, dan konstruktif; (3) sekolah merupakan tempat pengembangan nilai-nilai budaya (*values system*), kemampuan dan watak siswa, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mampu membebaskan proses indoktrinasi seperti model pendidikan P4.

Kelima, revitalisasi sistem evaluasi pendidikan dapat menjadi sumber inspirasi pembangunan peradaban. Selama evaluasi pendidikan dan hasil belajar cenderung berorientasi pada: (1) penguasaan aspek kognitif; (2) evaluasi hasil belajar belum menempatkan aspek sikap, watak, moral, dan kompetensi sosial sebagai tujuan pendidikan yang utama; (3) para guru dan/atau dosen belum memiliki wawasan dan pemahaman terhadap kompetensi sosial sebagai bagian penting pembangunan peradaban bangsa; (4) tidak adanya perilaku tokoh masyarakat dan pimpinan formal maupun nonformal yang pantas diteladani.

DAFTAR BACAAN

- Almond, Gabriel A. Dan Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture*. Boston: Little, Brown and Compay.
- Bahar, Safroedin (ed.). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Beverard, K and Geoffery Morris. 1996. *Effective School Management*. London: Paul Capman Publishing, Ltd.
- Bounds, Greg, et.al. 1994. *Beyond Total Quality Management: Toward Emerging Paradigm*. Singapore: McGraw-Hill International Edition.
- Delors, Jacques. 2002. *Pendidikan untuk Abad XXI: Pokok Persoalan dan Harapan*. Terjemahan WP Napitupulu. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Deverger, Maurice. 1981. *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae, Jakarta: Rajawali,
- Fischer, Joseph. 1970. *The Social Science and the Comparative Study of Educational Systems*. Scranton: International Textbook Company.
- Gafar, Affan (ed). 1983. *Beberapa Aspek Perbandingan Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Koreber, A.L. and Clyde Kluchohn. 1963. *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Vintage Books.

- Kreitner, Robert. 1999. *Management*. New Delhi: A.I.T.B.S. Publisher and Distributor.
- Ma'arif, Syafi'i. 2005. "Keteladanan Semakin Sunyi". *Kompas*. Jakarta; PT Kompas Media Nusantara.<http://www.kompas.com>. Tanggal 24 Nopember 2005.
- Parsons, Talcott and Edward A. Shils. 1951. *Toward General Theory of Action*. New York: Harper & Raw, Publishers.
- Sudijarto. 2005. "**Pendidikan Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional**". Makalah ditulis atas permin-taan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 7 Juli 2005.
- Sudijarto. 2003. "*Universitas dan Peran Strategisnya dalam Pembangunan Negara Bangsa dalam Era Globalisasi*". Makalah disampaikan dalam Semiloka Pengembangan Paradigma Pendidikan di Universitas Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2003.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah, 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Ganesindo.
- Umaedi, 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
2003. *Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
2003. *Rencana Strategik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Renstra Ditjen Dikti) 2003-2010*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- 2005 . "Depdiknas Jangan Jadi Milik Satu Golongan Saja". *Kompas*. Jakarta; PT Kompas Media Nusantara.<http://www.kompas.com>. Tanggal 5 April 2005.
- 2005 . "Benturan Peradaban: Orang Melayu Cuma Pandai Bercerita ...". *Kompas*. Jakarta; PT Kompas Media Nusantara.<http://www.kompas.com>. Tanggal 30 Nopember 2005.
- 2005 . "Benturan Peradaban: Mencari Melayu di Pulau Bintang". *Kompas*. Jakarta; PT Kompas Media Nusantara.<http://www.kompas.com>. Tanggal 1 Desember 2005.



DAFTAR HADIR DISKUSI PARALEL

Ruang : F 11
 Moderator : Dr. Suwito Eko Pramono, M.Si
 Bidang : Riset Pengembangan, Manajemen

| No | Pemakalah | Judul | TANDA TANGAN PRESENTASI |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Dr. Suwito Eko Pramono | Revitalisasi Sistem Evaluasi Pendidikan Sebagai Landasan Terwujudnya Pembangunan Peradaban Bangsa | |
| 2 | Lina Wati | Pengembangan Tari Topeng Losari Melalui Mata Pelajaran Seni Budaya Di Tingkat Pendidikan | |
| 3 | Rivo Panji Yudha, M.Pd | Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik Unjuk Kerja Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar | X |
| 4 | Imron Abu Cholid Wibowo | Peran Supervisi Akademik Pengawas Dan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum 2013 | |
| 5 | Jefry Deska Setyawan | Pengembangan Media Pembelajaran Lari Simpai Dan Lompat Balok Dalam Pembelajaran Penjasorkes Materi Lompat Jauh Gaya Jongkok SD Berbasis Kurikulum 2013 | X |
| 6 | Kenya Dwiyaningsih | Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Disiplin Bagi Siswa Sma Melalui Pembelajaran Ppkn Berbasis K 13 | X |
| 7 | Utsman | Penilaian Otentik Berbasis Kurikulum 2013 | |
| 8 | Gustom Azmi Agam | Hubungan Fleksibilitas Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Eolgo Dollyo-Chagi Pada Olahraga Taekwondo | |

9 Ahmad Soleh Pengembangan Instrumen Penilaian tentang Materi lembaga-lembaga negara dalam UUP 1945

10 Ahmad Karal-M. Disin dan Sempul Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Pengolahan Lasis

PANITIA SEMINAR NASIONAL EVALUASI PENDIDIKAN (SNEP II)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SABTU 22 NOVEMBER 2014

CATATAN PRESENTASI MAKALAH

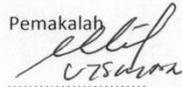
Ruang : F11
Moderator : Dr. Suwito Eko Purwanto, M.Pd.
Nama Penyaji : Usman
Instansi/Asal PT :
Judul : Penilaian autentik

Nama Penannya : Imron Abu
Instansi/Asal PT : S2 UNNES MP

Pertanyaan : Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh guru jika guru tersebut tidak menghapal murid: bagaimana model yang di terapkan guru dalam melakukan penilaian?

Jawaban : Guru sangat penting mengenal dan memahami nama-nama siswa, terutama terkait dengan penilaian autentik. Untuk menilai autentik, membuat tuntutan penilaian guru akan lebih, alih karena itu penilaian autentik harus dirumuskan sejak RPP di buat - sistem penilaian sistem penilaian dapat di buat secara bersama oleh guru seperti RPP pada di sini statusnya sama.

Pemakalah



PANITIA SEMINAR NASIONAL EVALUASI PENDIDIKAN (SNEP II)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SABTU 22 NOVEMBER 2014

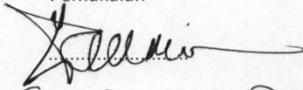
CATATAN PRESENTASI MAKALAH

Ruang : F II
Moderator : SUWITO E.P.
Nama Penyaji : SUWITO EKO PRAMONO
Instansi/Asal PT : PPS UNNES
Judul : KEMAUJUDAN SISTEM EVALUASI

Nama Penannya : AHMAD SOLEH.
Instansi/Asal PT : PPS UNNES

Pertanyaan : Kalau menurut saya, perbaikan evaluasi pendidikan kemungkinannya sistem pendidikan sebaiknya dimulai dari sistem UN. Karena dengan adanya UN yang digunakan akan ada standar penentuan kelulusan yang sangat menantang guru dan siswa. Bagaimana untuk Bapak?

Jawaban : Pada dasarnya, saya berpendapat bahwa UN harusnya memang mendorong perbaikan untuk pembelajaran. Guru lebih banyak melakukan drill goal dan pada kreatifitas pembelajaran. UN sebaiknya di-hentikan.

Pemakalah

Suwito Eko P.